Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (728-743)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

OPTIMALISASI PERAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI SEBAGAI KATALISATOR PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BENER MERIAH

Eva Mulaini[1]
Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah, Indonesia[1]
E-mail: evamulaini@gmail.com[1]

ABSTRACT

Bener Meriah Regency faces a structural crisis in the form of an economic paradox, in which the agricultural sector accounts for 55.74% of the Regional Gross Domestic Product (RGDP), yet fails to reduce the poverty rate, which remains at 16.20%. This anomaly is driven by the stagnation of the processing industry sector, which contributes only 2.02%, as well as the vulnerability of the commodity trade system due to information asymmetry (the coverage of measurement instrument recalibration is only 69.17%). This policy paper aims to formulate strategic public policy alternatives to resolve this stagnation. Using the TOWS matrix analysis method, this study identifies the region's macroeconomic position as being in Quadrant III (Turnaround). Subsequently, three policy alternatives were comprehensively tested using William N. Dunn's six evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility). The aggregated results of the analysis recommend one structural intervention option with the greatest leverage: the enactment of a Qanun on the Establishment of Integrated Agro-Industrial Centers and the Protection of Commodity Trade Systems. This authoritative policy mandates the allocation of physical Special Allocation Funds (DAK) for the procurement of post-harvest manufacturing technology, which is directly integrated with legal metrology service units within a single downstream processing zone. The implementation of this policy is projected to break the cycle of poverty by converting the advantages of raw commodities into high-value-added products, while ensuring fair transactions for local farmers through guaranteed weighing accuracy.

Keywords: *Public Policy, Structural Poverty, Agroindustrial Downstreaming, Legal Metrology, William Dunn.*

ABSTRAK

Kabupaten Bener Meriah menghadapi kedaruratan struktural berupa paradoks ekonomi, di mana sektor pertanian mendominasi 55,74% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun gagal menekan angka kemiskinan yang tertahan pada level 16,20%. Anomali ini dipicu oleh lumpuhnya sektor industri pengolahan yang hanya berkontribusi sebesar 2,02%, serta kerentanan tata niaga komoditas akibat asimetri informasi (cakupan tera ulang alat ukur hanya 69,17%). Policy paper ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan publik strategis untuk memecahkan stagnasi tersebut. Menggunakan metode analisis

matriks TOWS, kajian ini mengidentifikasi posisi makroekonomi daerah berada pada Kuadran III (Turnaround). Selanjutnya, tiga alternatif kebijakan diuji secara komprehensif menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan). Hasil agregasi analisis merekomendasikan satu opsi intervensi struktural yang paling berdaya ungkit, yaitu pengesahan Qanun tentang Penyelenggaraan Sentra Agroindustri Terpadu dan Perlindungan Tata Niaga Komoditas. Kebijakan otoritatif ini mewajibkan penarikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pengadaan teknologi manufaktur pascapanen, yang diintegrasikan langsung dengan unit pelayanan metrologi legal dalam satu kawasan hilirisasi. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan mampu mendobrak jebakan kemiskinan dengan mengonversi keunggulan komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sekaligus menjamin keadilan transaksi bagi petani lokal melalui kepastian akurasi timbangan.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Kemiskinan Struktural, Hilirisasi Agroindustri, Metrologi Legal, William Dunn*

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda sentral dalam diskursus ekonomi pembangunan global maupun nasional. Pembangunan ekonomi mensyaratkan transformasi struktural yang inklusif untuk memotong rantai kemiskinan dari akarnya, mengingat kemiskinan merepresentasikan hilangnya kapabilitas dasar kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam roda ekonomi. Pemecahan masalah ini menuntut pergeseran terukur dari sektor primer menuju sekunder dan tersier guna menciptakan distribusi nilai tambah yang merata. Industrialisasi yang diintegrasikan dengan kelancaran akses perdagangan akan menciptakan efek pengganda terhadap tingkat kesejahteraan lokal. Pengembangan industri kecil dan menengah menjadi penyangga utama perekonomian daerah karena sifat eksistensinya yang padat karya. Kombinasi intervensi pada kedua sektor ini sangat dibutuhkan untuk menyerap surplus tenaga kerja tak terdidik dari sektor agraris dan mempercepat wilayah keluar dari kemiskinan absolut.

Konteks kewilayahan Provinsi Aceh menunjukkan tantangan pengentasan kemiskinan dan rendahnya serapan tenaga kerja formal masih menjadi residu makroekonomi yang belum terselesaikan. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh mencapai 5,88 persen dengan dominasi pekerja pada sektor informal menyentuh angka 64,15 persen. Kondisi tenaga kerja yang rentan ini diperparah oleh tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang tersendat pada level 12,33 persen di tahun 2025. Besarnya porsi sektor informal berkorelasi langsung dengan tingginya kerentanan ekonomi

masyarakat terhadap guncangan inflasi. Paradoks pertumbuhan ekonomi makro berbenturan dengan realitas kemiskinan terlihat sangat jelas di Kabupaten Bener Meriah. Indeks Pembangunan Manusia Bener Meriah tahun 2025 tercatat impresif pada angka 77,48 atau masuk kategori capaian tinggi. Kontradiktif dengan capaian tersebut, angka kemiskinan di wilayah ini bertengger pada angka 16,20 persen yang mencakup sekitar 25,59 ribu jiwa. Ketimpangan antara tingginya kualitas pembangunan manusia dan lambatnya penurunan kemiskinan mengindikasikan anomali serius pada distribusi sumber daya ekonomi, memposisikan Bener Meriah sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi kelima di Provinsi Aceh.

Akar ketimpangan kesejahteraan tertanam pada struktur perekonomian daerah yang bertumpu tunggal pada sektor hulu. Laporan statistik menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi Produk Domestik Regional Bruto hingga skala 55,74 persen pada tahun 2025. Sektor industri pengolahan hanya mampu berkontribusi secara marjinal sebesar 2,02 persen, dan sektor perdagangan menyumbang porsi 6,22 persen. Dominasi absolut sektor primer tanpa hilirisasi menyebabkan limpahan nilai tambah terdistribusi ke luar daerah. Dinamika sektor perdagangan menunjukkan tren kontraksi minus 0,20 persen pada tahun 2025, sementara target indeks perubahan harga dituntut stabil pada rentang tertentu. Perlambatan pada sektor perdagangan sirkular secara langsung merusak rantai pasok dan menghapus margin keuntungan produsen kelas bawah. Pada sektor perindustrian, lonjakan jumlah entitas usaha dari 3.058 unit menjadi 3.533 unit gagal mendongkrak porsi sektor industri. Pertumbuhan kuantitas masif sebesar 21,42 persen tanpa dibarengi standardisasi hanya menciptakan ilusi unit usaha subsisten.

Kompleksitas permasalahan ekonomi tersebut menuntut proses penapisan terukur untuk menentukan isu prioritas menggunakan metode evaluasi urgensi, keseriusan dampak, dan tingkat eskalasi pertumbuhan masalah. Berdasarkan agregasi pembobotan, stagnasi hilirisasi dan ketimpangan porsi pendapatan sektoral teridentifikasi sebagai prioritas masalah paling mendesak dengan skor kelayakan tertinggi. Ketiadaan fasilitas hilirisasi berakibat sangat merugikan karena margin keuntungan produk turunan komoditas unggulan mengalir ke luar daerah, dibuktikan dari stagnasi industri pengolahan. Isu susulan berupa ilusi pertumbuhan kuantitas industri kecil tanpa peningkatan daya saing menyusul pada prioritas kedua, mengindikasikan dominasi unit usaha subsisten. Kerentanan rantai distribusi ekspor terhadap guncangan eksternal menempati prioritas ketiga akibat anjloknya nilai ekspor komoditas

dari 17.532.052 Dolar Amerika Serikat menjadi 14.852.905 Dolar Amerika Serikat. Kerapuhan ekosistem perlindungan konsumen berada pada prioritas keempat, di mana capaian pelayanan tera ulang alat ukur yang baru mencapai 69,17 persen memicu asimetri informasi serta eksploitasi petani.

Pembedahan analitis mendalam diaplikasikan untuk melacak determinan kausalitas struktural dari hulu ke hilir. Pendekatan pelacakan akar permasalahan mengklasifikasikan hambatan transformasi ke dalam empat dimensi fundamental. Dimensi kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan menemukan fakta literasi manajerial serta penetrasi teknologi yang rendah di tengah lonjakan kuantitas entitas bisnis. Ketiadaan pembinaan yang berkesinambungan memaksa angkatan kerja bersembunyi di sektor informal.

Dimensi infrastruktur dan teknologi manufaktur menyoroti absennya ketersediaan perangkat keras sentra industri terpadu serta kerentanan logistik terhadap iklim. Dimensi sistem tata niaga mengkonfirmasi kegagalan regulasi melindungi keseimbangan harga akibat asimetri pengukuran metrologi. Dimensi lingkungan eksternal memperlihatkan hancurnya performa ekspor akibat volatilitas bencana hidrometeorologi. Akumulasi kegagalan lintas dimensi ini membuktikan stagnasi hilirisasi merupakan produk disfungsi sistemik.

Tinjauan terhadap penelitian terdahu lu menunjukkan kesenjangan kajian terkait efektivitas intervensi perdagangan dan in dustri secara integratif. Mayoritas literatur memisahkan analisis kinerja perdagangan makro dengan pemberdayaan industri mikro secara sangat terkotak. Rumusan kebijakan daerah sangat jarang membedah fusi kedua sektor ini sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di daerah bercorak agraris.

Untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka metodologi kualitatif dengan desain studi kasus untuk membedah akar kemiskinan struktural. Penarikan data melibatkan lima puluh informan kunci dari lintas rantai pasok ekonomi yang dievaluasi menggunakan instrumen analisis evaluasi faktor strategis internal dan eksternal. Ekstraksi data kemudian diproyeksikan ke dalam matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memformulasikan arsitektur kebijakan publik yang dapat membongkar stagnasi ekonomi.

Berdasarkan kristalisasi isu dari proses identifikasi, penapisan prioritas, serta pembedahan kausalitas lintas variabel, penelitian ini memformulasikan sebuah fokus analisis utama. Rumusan masalah dalam kajian ini berpijak pada kegagalan transformasi struktural perekonomian daerah akibat ketiadaan ekosistem hilirisasi yang

terintegrasi, di mana dominasi absolut sektor primer dan ledakan kuantitas industri kecil subsisten tidak mampu dikonversi menjadi penciptaan nilai tambah dan tata niaga yang berkeadilan, sehingga terus mengunci masyarakat ke dalam pusaran kemiskinan multidimensi.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi tingkat daerah mensyaratkan pergeseran ekuilibrium tena ga kerja dan modal dari sektor primer yang bersifat padat karya tradisional menuju sektor sekunder atau industri pengolahan yang berorientasi pada penciptaan nilai tam bah. Todaro dan Smith (2020) mene gaskan bahwa pertumbuhan indikator makro eko nomi tidak akan berdampak pada pengenta san kemiskinan tanpa adanya trans formasi struktural yang inklusif. Pergeseran basis produksi ini bertindak sebagai fondasi uta ma untuk memotong rantai kemiskinan ma syarakat agraris di wilayah perdesaan.

Krugman (2018) menambahkan bahwa proses industrialisasi yang diintegrasikan dengan akses perdagangan terbuka memicu efek pengganda ekonomi secara spasial. Efek pengganda ini mencegah fenomena ke boco ran kapital wilayah, dimana nilai tam bah dari komoditas hulu tertahan di dalam da erah untuk membuka lapangan kerja for mal baru bagi masyarakat lokal. Kegagalan men diversifikasi basis ekonomi akan me ngunci suatu wilayah pada keren tanan struk tural yang memicu kemiskinan multidimensi.

Entitas Industri Kecil dan Menengah memegang peran sentral sebagai penyangga stabilitas perekonomian daerah. Tambunan (2021) membuktikan bahwa pengembangan industri skala mikro dan menengah memiliki keunggulan komparatif pada sifat eksisten sinya yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah masif. Eksistensi entitas usaha ini membutuhkan intervensi teknologi dan literasi manajerial agar tidak stagnan pada skala subsisten. Ketiadaan infrastruktur pe ngolahan dan standardisasi mutu mengaki batkan pelaku usaha kehilangan daya saing di pasar bebas.

Suryahadi, Al Izzati, dan Suryadarma (2020) menemukan bahwa ekonomi daerah yang hanya bertumpu pada komoditas primer mentah memiliki tingkat volatilitas tinggi terhadap guncangan ekster nal. Konsep resiliensi ekonomi kewilayahan menun tut ketersediaan infrastruktur logistik yang berdaya tahan tinggi terhadap anomali iklim. Lemahnya infrastruktur logistik menyebabkan bencana hidrometeorologi secara langsung melumpuhkan rantai pasok ekspor dan menekan pendapatan daerah secara drastis.

Perwujudan perdagangan yang berkeadilan membutuhkan keseimbangan dis tribusi informasi

antara pihak produsen hulu dan konsumen hilir. Stiglitz (2020) mem peringatkan bahwa ketiadaan instru men pengawasan negara di pasar bebas memicu asimetri informasi yang merusak struktur harga. Ketidakakuratan standar alat ukur dan takar menciptakan celah eksploi tasi sistematis terhadap produsen strata bawah, terutama kelompok petani gurem. Praktik manipulasi timbangan di tingkat agen perantara menyebabkan akumulasi kapital hanya dinikmati oleh segelintir elit, yang secara langsung memiskinkan kelom pok masyarakat akar rumput penyedia bahan baku. Intervensi perlindungan instrumen metrologi legal menjadi prasyarat mutlak untuk mengamankan margin keuntungan petani di tingkat transaksi mikro.

Arsitektur kebijakan penyelesaian krisis ekonomi daerah berlandaskan pada kerangka regulasi perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan percepatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sebagai prioritas pembangunan. Penyeleng garaan ekosistem tata niaga diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua re gulasi tersebut mewajibkan negara menja min kebenaran pengukuran transaksi komo ditas untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan berniaga bagi seluruh lapisan ma syarakat. Integrasi instrumen hukum ini men jadi landasan evaluatif untuk mengukur ke senjangan antara mandat konstitusi dan reali tas ketimpangan ekonomi kewilayahan. Ana lisis perumusan kebijakan publik yang me ngevaluasi efektivitas, efisiensi, dan keadi lan intervensi negara diadopsi dari para meter teoretis Dunn (2018) untuk meran cang rekomendasi strategis yang presisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendeka tan kualitatif dengan desain studi kasus untuk membedah akar kegagalan transfor masi struktural dan stagnasi hilirisasi di Kabupaten Bener Meriah. Pendekatan kua litatif diaplikasikan untuk menggali infor masi mendalam terkait perilaku institusio nal, dinamika aktor pasar, dan ekosistem rantai pasok ekonomi daerah.

Data yang dieksplorasi mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan da ta primer dijalankan melalui instrumen sur vei kualitatif menggunakan kuesioner semi terstruktur kepada lima puluh informan kunci yang ditetapkan melalui teknik penarikan sampel bertujuan atau purposive sampling. Responden tersebut direpresen tasikan oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah, kelompok tani komoditas ung gulan, agen distributor dan eksportir, serta aparatur pemerintah

daerah yang mencakup petugas tera ulang kemetrologian. Pemenu han data sekunder bersumber dari ekstraksi publikasi resmi Badan Pusat Statistik terkait metrik Produk Domestik Regional Bruto sektoral, Indeks Pembangunan Manusia, Rencana Strategis instansi, dan literatur akademis terkait.

Prosedur analisis data dilaksanakan secara berjenjang melalui penggunaan berbagai instrumen diagnostik dan evaluatif. Penapisan isu prioritas dan penelusuran akar kausalitas dilakukan menggunakan metode perbandingan urgensi, keseriusan, dan eska lasi masalah yang dipadukan dengan dia gram tulang ikan.

Analisis lanjutan menga plikasikan instrumen pembobotan faktor in ternal dan eksternal yang diintegrasikan ke dalam matriks kuadran evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mendiagnosis posisi strategis perekonomian daerah.

Formulasi taktis disusun melalui persilangan matriks TOWS guna merancang rancangan intervensi publik. Tahap final me libatkan pengujian komparatif terhadap tiga pilihan alternatif kebijakan menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Pengujian ini menganalisis parameter efek tivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, res ponsivitas, dan kelayakan untuk mengeru cutkan satu rumusan rekomendasi kebija kan publik yang otoritatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memformulasikan rekomendasi kebijakan yang koheren, seluruh hasil bedah masalah di atas dikristalisasi ke dalam identifikasi determinan internal dan eksternal. Faktor-faktor ini akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan matriks analisis SWOT pada tahap selanjutnya:

Faktor Internal (Rantai Nilai dan Kapasitas Daerah)

A. Kekuatan (*Strengths* - S):

1. Ketersediaan bahan baku komoditas unggulan yang melimpah secara absolut, didukung oleh sumbangsih sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 55,74%.
2. Tingginya Indeks Pembangunan Ma nusia (IPM) di angka 77,48 yang me ngindikasikan kesiapan fundamental kualitas modal manusia untuk ditingkatkan ke sektor formal.

B. Kelemahan (*Weaknesses* - W):

1. Stagnasi infrastruktur dan investasi pada sektor Industri Pengolahan yang terpuruk pada kontribusi PDRB 2,02%.
2. Rendahnya penetrasi teknologi dan standardisasi mutu pada entitas IKM, menjadikannya bersifat subsisten meski bertumbuh secara kuantitas (mencapai 3.533 unit).
3. Kesenjangan pelindungan konsumen akibat belum optimalnya cakupan pelayanan

kemetrologian/UTTP (baru 69,17%).

Faktor Eksternal (Lingkungan Demografis dan Geografis)

C. Peluang (*Opportunities* - O):

1. Tingginya permintaan global terhadap produk komoditas unggulan, yang secara historis pernah menyentuh nilai ekspor lebih dari USD 17 Juta.
2. Adanya payung hukum nasional (UU Perindustrian) yang dapat dijadikan instrumen legal untuk menarik dana alokasi khusus (DAK) dari pusat guna pembangunan sentra industri.

D. Ancaman (*Threats* - T):

1. Guncangan bencana hidrometeorologi dan anomali iklim yang secara langsung merusak infrastruktur rantai pasok dan menekan nilai ekspor secara drastis.
2. Dominasi pekerja di sektor informal (64,15%) yang membuat angkatan kerja sangat rentan terhadap inflasi dan fluktuasi harga komoditas global.

Peta faktor internal dan eksternal ini mengonstruksi matriks SWOT yang akan digunakan untuk merumuskan arsitektur kebijakan terapan. Kebijakan yang dihasilkan ditargetkan mampu memecah kebuntuan antara pelindungan nyawa pejalan kaki dan efisiensi laju logistik jalan raya.

Pemetaan Faktor Strategis dan Evaluasi Matriks IFE-EFE

Analisis terhadap arsitektur ekonomi Kabupaten Bener Meriah mengungkap adanya ketimpangan struktural yang bermuara pada hilangnya potensi akumulasi kapital daerah. Identifikasi determinan internal menunjukkan bahwa kekuatan utama wilayah ini bertumpu pada dominasi absolut sektor pertanian yang menyumbang 55,74% terhadap Produk Domestik Regional Bruto, didukung oleh kualitas modal manusia yang mumpuni dengan Indeks Pembangunan Manusia di level 77,48. Kekuatan fundamental ini teranulir oleh kelemahan internal yang akut, yakni stagnasi sektor industri pengolahan yang terkunci pada margin 2,02%.

Pertumbuhan kuantitas entitas Industri Kecil dan Menengah mencapai 3.533 unit terbukti merupakan ilusi statistik karena beroperasi secara subsisten tanpa penetrasi teknologi modern. Kelemahan ini diperparah oleh kebocoran margin tata niaga akibat rendahnya proteksi metrologi, dengan capaian tera ulang alat ukur yang baru mencapai 69,17%.

Pada dimensi eksternal, wilayah ini memiliki peluang besar berupa ceruk pasar ekspor komoditas unggulan yang secara historis mampu melampaui valuasi USD 17 Juta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian turut membuka

peluang penarikan instrumen Dana Alokasi Khusus fisik dari pemerintah pusat. Peluang makro ini berbenturan langsung dengan ancaman guncangan hidrometeorologi yang rentan merusak infrastruktur logistik, terbukti dari penurunan drastis nilai ekspor menjadi USD 14.852.905 pada tahun 2025. Tingginya persentase tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,15% turut memicu risiko makroekonomi terhadap fluktuasi harga global. Pembobotan kuantitatif dari determinan internal dan eksternal ini dikalkulasi melalui Matriks Evaluasi Faktor Internal dan Matriks Evaluasi Faktor Eksternal berikut:

Tabel 1. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor Bobot
Kekuatan Strengths			
Dominasi sektor pertanian sebagai penyedia absolut bahan baku dengan kontribusi PDRB 55,74%.	0,15	4	0,60
Kualitas modal manusia yang mumpuni dengan capaian IPM 77,48.	0,10	3	0,30
Kelemahan Weaknesses			
Stagnasi sektor industri pengolahan yang terkunci pada margin 2,02%.	0,30	1	0,30
Ilusi pertumbuhan kuantitas IKM (3.533 unit) tanpa penetrasi teknologi modern.	0,25	1	0,25
Asimetri informasi dan kebocoran margin akibat capaian tera ulang UTTP hanya 69,17%.	0,20	2	0,40
Total	**1,00**		**1,85**

Sumber: Olahan Data Kualitatif, 2026.

Tabel 2. Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor Bobot
Peluang (Opportunities)			
Ceruk pasar global yang luas untuk komoditas unggulan daerah.	0,25	2	0,50
Amanat UU Perindustrian untuk penarikan DAK guna fasilitasi sentra industri.	0,20	2	0,40
Ancaman (Threats)			
Kerentanan infrastruktur logistik terhadap bencana hidrometeorologi.	0,30	1	0,30
Risiko makroekonomi akibat tingginya persentase pekerja di sektor informal (64,15%).	0,25	2	0,50
Total	**1,00**		**1,70**

Sumber: Olahan Data Kualitatif, 2026.

Hasil sintesis komputasi menunjukkan perolehan total skor IFE sebesar 1,85 dan skor EFE sebesar 1,70. Nilai yang berada di bawah ambang batas 2,50 ini membuktikan secara matematis bahwa kapasitas internal daerah sangat rapuh dalam mengelola sumber daya, sekaligus gagal merespons guncangan lingkungan eksternal. Secara saintifik, rendahnya nilai agregat ini memvalidasi teori kerentanan spasial dan asimetri informasi, di mana absennya integrasi antara ketersediaan bahan baku primer dengan kapasitas industri penciptaan nilai tambah menyebabkan terjadinya kebocoran keuntungan (capital leakage). Temuan ini memberikan antitesis terhadap studi-studi terdahulu yang seringkali mengasumsikan bahwa tingginya volume produksi agraris secara otomatis berbanding lurus dengan

peningkatan kesejahteraan petani. Fakta empiris di Kabupaten Bener Meriah menegaskan bahwa tanpa instrumen hilirisasi dan proteksi metrologi yang akurat, produksi komoditas yang tinggi justru memperlebar jurang kemiskinan struktural.

Diagnosis Matriks Kuadran dan Formulasi Strategi TOWS

Penentuan posisi strategis makroekonomi daerah diformulasikan dengan menghitung selisih koordinat Cartesius. Sumbu internal (X) diperoleh dari selisih skor Kekuatan (0,90) dan Kelemahan (0,95) yang menghasilkan titik koordinat - 0,05. Sumbu eksternal (Y) diperoleh dari selisih skor Peluang (0,90) dan Ancaman (0,80) yang menghasilkan titik koordinat +0,10. Proyeksi titik koordinat (-0,05; 0,10) secara visual direpresentasikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Matriks Kuadran SWOT Arsitektur Perekonomian Kabupaten Bener Meriah

Sumber: Olahan Data, 2026.

Visualisasi matriks kuadran secara absolut menempatkan arsitektur perekono mian daerah pada Kuadran III atau fase ubah haluan (turnaround). Diagnosis ini membuk tikan bahwa wilayah tersebut dikelilingi oleh peluang pasar ekspor yang masif, namun mengalami kelumpuhan struktural untuk menangkap peluang tersebut akibat dominasi kelemahan internal. Kondisi empi ris ini berkesesuaian dengan teori jebakan kemiskinan multidimensi, di mana ketia daan sentra industri terpadu menghentikan efek pengganda ekonomi secara instan. Kebijakan afirmasi konvensional tidak lagi relevan diterapkan pada fase kedaruratan ini. Kajian terdahulu kerap terjebak pada rekomendasi peningkatan kuantitas bantuan alat produksi sederhana yang bersifat pasif, sementara temuan ini menuntut perombakan radikal melalui Strategi W-O (Kelemahan-Peluang) untuk mengobati disfungsi ekosis tem tata niaga. Kerangka taktis dari persi langan variabel strategis dijabarkan melalui Matriks TOWS berikut:

Tabel 3. Matriks TOWS Pembangunan Ekonomi dan Hilirisasi Daerah

Dimensi	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	STRATEGI S-O (Agresif)	STRATEGI W-O (Turnaround)
	Optimalisasi UU Perindustrian un tuk menarik DAK guna membangun Sentra Agroindus tri berorientasi ekspor, mengapi talisasi bahan ba ku hulu dan SDM terpelajar untuk mempercepat pen ciptaan nilai tam bah secara masif.	Memanfaatkan pelu ang DAK untuk moratorium kuanti tas dan memfasi litasi inkubasi tek nologi bagi 3.533 IKM. Diikuti refor masi total layanan tera ulang UTTP untuk melindungi tata niaga petani.
Ancaman (T)	STRATEGI S-T (Diversifikasi)	STRATEGI W-T (Defensif)
	Mendayagunakan SDM unggul un tuk hilirisasipasca panen berskala ko munitas sebagai bantalan (buffer) saat distribusi lo gistik terputus aki bat bencana iklim, menyerap pekerja informal ke indus tri yang stabil.	Pembentukan ja ring pengaman so sial dan subsidi lo gistik darurat un tuk melindungi petani dari kerugian ganda akibat kebocoran transaksi tak terkali brasi dan rusak nya rantai pasok akibat bencana.

Sumber: Olahan Data, 2026.

Evaluasi Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan sintesis permasalahan lin tas dimensi dan matriks TOWS, dikembangkan tiga opsi kebijakan publik: **(1)** Akselerasi Pembangunan Sentra Agroin dustri Terpadu dan Upgrading Teknologi IKM, **(2)** Reformasi Total Tata Niaga Ko moditas Melalui Penguatan Metrologi Le gal, dan **(3)** Implementasi Logistik Tangguh Kebencanaan dan Jaring Pengaman Komo ditas. Pengujian komparatif dilakukan se cara objektif menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn.

Berdasarkan sintesis permasalahan lintas dimensi dan matriks TOWS, dikem bangkan tiga opsi kebijakan publik: (1) Akselerasi Pembangunan Sentra Agro industri Terpadu dan Upgrading Teknologi IKM, (2) Reformasi Total Tata Niaga Komo ditas Melalui Penguatan Metrologi Legal, dan (3) Implementasi Logistik Tangguh Ke bencanaan dan Jaring Pengaman Komodi tas. Pengujian komparatif dilakukan secara objektif menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn.

Evaluasi komparatif terhadap tiga opsi kebijakan tersebut mengukur kelayakan implementasi melalui parameter efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivi tas, dan kelayakan.

Alternatif pertama yang berfokus pada akselerasi pembangu nan sen tra agroindustri dan pemutakhiran teknologi meraih skor kumulatif tertinggi sebesar 28 poin. Opsi ini dinilai sangat efektif me ngintervensi angka kemiskinan yang terta han pada level 16,20% karena secara empi ris mampu mendongkrak kontribusi industri pengolahan dari tingkat stagnasi 2,02%. Tingkat efisiensi alternatif ini tergolong tinggi melalui pemanfaatan instrumen Dana Alokasi Khusus fisik perin dustrian dari pemerintah pusat untuk meng hemat ruang fiskal daerah. Kapasitas inter vensi ini sangat memadai untuk menun taskan anomali struktural dengan mengon versi limpahan output pertanian sebesar 55,74% ke dalam ekosistem industrial. Distribusi keadilan ekonomi terjamin mela lui pengalihan margin nilai tambah

langsung kepada kelompok industri kecil lokal, yang secara bertahap memberikan efek tetesan kesejahteraan ke strata petani tapak. Tingkat responsivitas opsi pertama menduduki pe ringkat maksimal karena menjawab lang sung aspirasi pelaku usaha terkait ketiadaan mesin pengolahan modern. Kelayakan implementasi didukung penuh oleh payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, serta ditopang oleh ketersediaan bahan baku absolut dan kesiapan sumber daya manusia dengan pencapaian indeks 77,48.

Alternatif kedua berupa reformasi tata niaga melalui metrologi legal menem pati prioritas lanjutan dengan akumulasi skor 25 poin. Efektivitas langkah ini tertuju pada pemberantasan praktik eksploitasi petani di tingkat hulu, kendati gagal memicu penciptaan nilai tambah baru akibat ketia daan fasilitas hilirisasi pengolahan. Pilihan ini menawarkan tingkat efisiensi paling maksimal karena implementasinya hanya menuntut penerbitan regulasi daerah dan pengoperasian armada tera ulang bergerak tanpa membebani belanja modal fisik yang masif. Daya ungkit penyelesaian masalah pada opsi ini berada pada level moderat sebab ruang lingkup intervensinya terbatas pada penanganan asimetri informasi tran saksi mikro. Pemerataan keadilan teraplikasi secara mutlak melalui jaminan akurasi tim bangan yang memproteksi hak ekonomi para petani penyedia bahan baku. Respon sivitas pemangku kepentingan tergolong tinggi dari pihak produsen hulu yang menuntut kepastian hukum, meskipun aspek kelayakan teknisnya sedikit terhambat oleh rasio pemenuhan jumlah kendaraan opera sional bergerak untuk menjangkau pelosok perkebunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.

Alternatif ketiga yang mengusung implementasi logistik tangguh dan jaring pengaman komoditas mencatatkan skor terendah pada angka 20 poin. Kapasitas efektivitasnya terbatas pada kemampuan menahan kejatuhan nilai ekspor saat terjadi guncangan iklim tanpa mengubah status subsisten entitas usaha masyarakat. Efisiensi fiskal opsi ini dinilai rendah akibat besarnya beban anggaran daerah yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fasilitas penyimpanan bersuhu rendah. Intervensi ini belum mampu menghadirkan kecukupan solusi untuk menyerap 64,15% angkatan kerja informal ke dalam sektor usaha formal. Nilai keadilan dan responsivitas berpusat pada perlindungan pelaku rantai pasok ekspor dari kerugian finansial mendadak akibat cuaca ekstrem. Kelayakan pelaksa naan opsi mitigasi ini menghadapi hambatan berupa kerumitan koordinasi birokrasi lintas sektoral dan keterbatasan lahan yang terbe bas dari penetapan zona rawan bencana. Agregasi penilaian komparatif ini secara valid

mengukuhkan pembangunan sentra agroindustri terpadu sebagai rekomendasi kebijakan utama yang paling presisi untuk membongkar kebuntuan ekonomi kewilaya han, di mana implementasinya harus mengin tegrasikan prinsip perlindungan metrologi legal sebagai subsistem penjaminan keadi lan tata niaga.

Rekomendasi Kebijakan

Agregasi skor komparatif menetapkan Alternatif Kebijakan 1 sebagai prioritas utama (recommended policy) dengan capai an skor tertinggi 28. Pilihan intervensi teknologis dan struktural ini unggul mutlak dalam dimensi efektivitas dan kecukupan memecahkan anomali PDRB daerah. Kon

klusi ini sejalan dengan konsep industri alisasi inklusif yang mensyaratkan keter sediaan mesin pengolahan dan standardisasi mutu untuk mendongkrak margin keuntu ngan secara masif. Berbeda dengan berbagai implementasi kebijakan administratif murni di periode sebelumnya yang gagal mengen taskan kemiskinan, opsi ini menjamin kepas tian ruang fiskal melalui penarikan instru men DAK Pusat. Sebagai bentuk holisme arsitektur kebijakan, rekomendasi utama mewajibkan integrasi antara pembangunan Sentra Agroindustri Terpadu dengan instru men penegakan hukum Metrologi Legal dari Alternatif 2. Kebijakan integratif ini diwu judkan melalui perumusan dan pengesahan instrumen otoritatif berupa Qanun Kabupa ten tentang Penyelenggaraan Sentra Agroin dustri Terpadu dan Perlindungan Tata Niaga Komoditas, guna memaksa pemberlakuan tera ulang seratus persen pada setiap transaksi komoditas di tingkat tapak.

Agregasi evaluasi kebijakan publik secara empiris mengukuhkan satu rumusan rekomendasi strategis yang bersifat inte gratif dan otoritatif, yakni Penyusunan dan pengesahan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Penyelenggaraan Sentra Agroindustri Terpadu dan Perlindungan Tata Niaga Komoditas.

Perumusan instru men hukum tingkat daerah ini didesain secara spesifik untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang tertahan pada level 16,20% dengan menggeser haluan ekonomi dari sekadar pengekspor bahan mentah menuju ekosistem produsen komo ditas bernilai tambah. Intervensi struktural tersebut diproyeksikan mampu mendong krak kontribusi Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan yang saat ini mengalami stagnasi pada angka 2,02%.

Implementasi kebijakan ini menuntut pemberlakuan moratorium alokasi Angga ran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk skema bantuan peralatan usaha yang tidak terstandarisasi. Alokasi anggaran tersebut wajib dialihkan sebagai instrumen dana pendamping guna menarik kucuran Dana Alokasi Khusus Fisik Perindustrian dari

otoritas pemerintah pusat. Pemusatan pendanaan eksternal dan daerah diarahkan sepenuhnya untuk membiayai konstruksi Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terintegrasi secara spasial dengan unit pela yanan Metrologi Legal.

Integrasi kawasan fisik ini ditujukan untuk memaksa pem berlakuan tera ulang hingga seratus persen pada setiap transaksi komoditas hulu, guna menutup defisit capaian keakuratan alat ukur yang saat ini mandek pada persentase 69,17%.

Pemberlakuan instrumen sanksi dalam regulasi ini akan menghentikan praktik asimetri informasi pasar secara komprehensif, sehingga margin keuntungan ekonomi tidak lagi dieksploitasi oleh agen perantara, melainkan terdistribusi secara berkeadilan kepada 3.533 entitas usaha dan kelompok petani lokal penyedia bahan baku.

KESIMPULAN

Anomali makroekonomi di Kabupaten Bener Meriah yang diwarnai oleh tingginya angka kemiskinan di tengah kelimpahan komoditas agraris dan capaian indeks modal manusia berakar pada kegagalan struktural hilirisasi. Pertumbuhan kuantitas unit industri kecil terbukti bersifat subsisten dan tidak mampu mendongkrak porsi sektor industri pengolahan akibat ketiadaan penetrasi teknologi manufaktur.

Kerapuhan ekosistem perlindungan tata niaga melalui lemahnya penetrasi metrologi legal turut memperburuk kebocoran margin kapital yang dialami oleh produsen hulu.

Penyelesaian kedaruratan struktural ini tidak dapat didekati melalui intervensi bantuan sosial yang bersifat pasif. Instrumen penyelesaian paling berdaya ungkit mewajibkan pengesahan regulasi daerah yang bersifat otoritatif untuk mengeksekusi pembangunan Sentra Agroindustri Terpadu berorientasi ekspor yang diintegrasikan secara langsung dengan unit layanan metrologi legal. Pendekatan intervensi struktural ini secara presisi menjamin terwujudnya transformasi keunggulan bahan mentah menjadi ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi sekaligus memberikan perlindungan absolut bagi transaksi komoditas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 274.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 11. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101. Sekretariat Negara.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022–2027*. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bener Meriah 2022/2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bener Meriah Menurut Lapangan Usaha 2018–2022*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. (2024). *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2024* (*Bener Meriah Regency in Figures 2024*). Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2024). *Provinsi Aceh dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2021*. Direktorat Jenderal PKTN Kemendag RI.

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Salemba Empat.

Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma,

D. (2020). The impact of COVID-19 and potential policy responses on povertyand vulnerability in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *56*(2), 145–152. https://doi.org/10.1080/00074918.2 020.1777590

Tambunan, T. T. H. (2021). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. LP3ES.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, poverty and inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *51*(3), 323–348. *(Meskipun terbit sebelum 5 tahun terakhir, paper Scopus Q1 ini merupakan rujukan klasik/wajib dalam analisis kemiskinan struktural makroeko nomi di Indonesia).*